

**LEMBAGA PEMERINTAHAN KONTEMPORER YANG  
KOMPREHENSIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM  
KELEMBAGAAN NEGARA**

**Pinky Aruna Iswandarie<sup>1</sup>, Benita Lidya Maharani<sup>2</sup>, Lydyana Trisnaeni Martin<sup>3</sup>, Eka  
Era Nurtanti<sup>4</sup>, Fiqri Fitrah Banu Irfansyah<sup>5</sup>**  
[pinkyaruna123@gmail.com](mailto:pinkyaruna123@gmail.com)<sup>1</sup>, [benitalidyaaa@gmail.com](mailto:benitalidyaaa@gmail.com)<sup>2</sup>, [lydyanamt@gmail.com](mailto:lydyanamt@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ekaeranurtanti@gmail.com](mailto:ekaeranurtanti@gmail.com)<sup>4</sup>, [fbnu06@gmail.com](mailto:fbnu06@gmail.com)<sup>5</sup>  
**Universitas Tidar**

**Abstrak:** Sebuah negara yang berdaulat, tidak lepas dengan adanya lembaga pemerintahan negara. lembaga pemerintahan kontemporer memiliki peran fungsi yang sangat krusial karena lembaga pemerintahan negara merupakan sebuah penjamin stabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan suatu negara. Dengan adanya perkembangan zaman yang pesat dan perkembangan teknologi yang semakin modern, disertai pula dengan tantangan dan dinamika yang semakin kompleks bagi lembaga pemerintahan kontemporer indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan serta tantangan sebuah lembaga pemerintahan kontemporer yang komprehensif ditinjau dari perspektif hukum kelembagaan negara dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari lembaga pemerintah kontemporer sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 meskipun dalam pengimplementasiannya terdapat beberapa kendala dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern seperti munculnya Artificial Intelligence atau yang sering disebut dengan AI. Oleh karena itu diperlukan penegasan terhadap prinsip-prinsip dalam perspektif hukum kelembagaan negara.

**Kata kunci:** Lembaga, Kontemporer, AI.

## **PENDAHULUAN**

Negara berdaulat, yang merupakan perangkat negara yang lengkap, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan lembaga negara. Menurut teori hukum ketatanegaraan, suatu negara dianggap berdaulat jika memenuhi empat kriteria: harus memiliki penduduk, pemerintahan, wilayah yang ditentukan dengan batas-batas yang ditentukan, dan pengakuan internasional. Teori negara klasik mengakui kekuasaan legislatif, eksklusif, dan yudikatif sebagai bagian dari lembaga negara, yang merupakan alat kelengkapan di dalam negara.

Lembaga negara juga dapat didefinisikan secara longgar sebagai organ atau badan negara yang menjalankan peran organisasional tata kelola negara. Individu yang bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam sistem administrasi negara dikenal sebagai organ negara atau badan negara. Konstitusi, bersama dengan undang-undang dan peraturan yang mengikutinya, menetapkan tujuan bersama yang harus dicapai oleh lembaga-lembaga negara ini. Lembaga-lembaga negara dalam suatu negara pada hakikatnya otonom dalam menjalankan kekuasaannya. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh Konstitusi adalah organ konstitusional; lembaga-lembaga yang dibentuk oleh undang-undang adalah organ perundang-undangan; dan lembaga-lembaga yang dibentuk hanya dengan keputusan presiden tidak diragukan lagi berstatus lebih rendah dan memberikan pejabat yang duduk di dalamnya perlakuan hukum yang kurang menguntungkan. Dengan cara yang sama, kedudukan lembaga tersebut tidak diragukan lagi berkurang jika didirikan dan diberi wewenang sesuai dengan hukum setempat.

Lembaga, menurut Ruttan dan Hayami (1984), adalah pedoman di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang membantu para anggotanya berkoordinasi dengan harapan setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

Pemerintah berasal dari kata Yunani "kubernan," yang berarti nahkodah kapal. Itu berarti memandang ke depan (Surbakti, 2002; 167). Di sisi lain, beberapa berpendapat bahwa kata pemerintahan berasal dari kata "perintah." Ada empat komponen dalam kata perintah. Yang pertama adalah bahwa ia merujuk pada hubungan antara dua orang. Kedua, ada kontrak antara kedua belah pihak. Ketiga, kekuasaan adalah milik pihak yang memerintah. Keempat, kepatuhan ditunjukkan oleh pihak yang diperintah (Martini dan Juwono, 2015; 17). Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang dipimpin oleh orang yang memiliki akuntabilitas, kekuasaan, dan visi. Kemajuan suatu negara bangsa merupakan fokus utama pemerintah setiap saat. Pemerintahan telah ada selama ribuan tahun, baik sebagai lembaga maupun sebagai proses.

Kata "kontemporer" mengacu pada sesuatu yang terjadi secara bersamaan, pada saat itu, selama, atau di masa sekarang. Istilah "masa kini" dan "modern" juga dapat mengacu pada hal-hal yang sama dengan keadaan saat ini. Istilah "lembaga pemerintahan kontemporer" berhubungan dengan kerangka kerja dan sistem yang digunakan di era saat ini untuk menjalankan kewenangan dan melaksanakan tugas resmi.

Kata komprehensif berasal dari kata Bahasa Inggris *comprehensive*, yang berarti luas, menyeluruh, teliti, dan mencakup banyak hal. Frasa ini digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana sesuatu dapat menawarkan lebih banyak wawasan dan penjelasan yang komprehensif tentang materi tersebut.

Lembaga pemerintahan kontemporer di Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam menjalankan fungsinya. Dari perspektif hukum kelembagaan negara, penting untuk memahami dinamika interaksi antar lembaga serta peran teknologi dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Transformasi ini tidak hanya membutuhkan adaptasi struktural tetapi juga perubahan budaya dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.

Pemerintahan kontemporer mempunyai peran krusial dalam struktur dan fungsi negara, Pemerintahan kontemporer dari perspektif hukum kelembagaan negara juga sangat penting karena berperan sebagai fundamen bagi stabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan Di Indonesia, lembaga-lembaga ini tidak hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi juga untuk menjamin prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, terdapat perubahan signifikan dalam kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara, yang menciptakan dinamika baru dalam hubungan antar lembaga. Dalam perspektif hukum kelembagaan negara, lembaga pemerintahan harus beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi saat ini, Terdapat tantangan bagi lembaga pemerintahan semakin kompleks. Isu-isu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi perhatian utama yang dihadapi oleh lembaga-lembaga negara. Urgensi keberadaan lembaga pemerintahan yang komprehensif ini tidak hanya terletak pada fungsi administratifnya, tetapi juga pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Dari perspektif hukum kelembagaan negara, hal ini mencakup penegasan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan demikian, lembaga pemerintah diharapkan dapat menjawab tantangan zaman, termasuk tuntutan masyarakat akan partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan komprehensif dalam pengelolaan pemerintahan juga mendukung pembangunan hukum yang berlandaskan pada keadilan sosial. Ini penting agar setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian pemerintah kontemporer memiliki peran dalam meningkatkan akuntabilitas, memperkuat demokrasi, beradaptasi dengan dinamika sosial, serta menegakkan hukum. lembaga-lembaga pemerintah ini menjadi pilar penting dalam mewujudkan negara yang demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman, terus mengkaji dan mengevaluasi efektivitas penerapan hukum kelembagaan negara yang sesuai menjadi suatu keharusan untuk mencapai tujuan tersebut, menjadikan lembaga pemerintahan sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan Das Sollen.

Untuk itu, menimbang urgensi yang ada di angkatlah sebuah kajian dengan Judul “Lembaga Pemerintahan kontemporer yang Komprehensif ditinjau dari Perspektif Hukum Kelembagaan Negara” hal ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang ada. Sehingga, ditemukan solusi yang sesuai..

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif Menurut Perreault dan McCarthy (2006: 176), bertujuan untuk menggali informasi secara dalam dan terbuka di berbagai tanggapan. Jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang mencoba untuk mengemukakan berbagai pikiran mereka mengenai suatu topik dengan hasil deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali informasi secara detail dan terperinci melalui pengumpulan segala informasi yang berhubungan atau terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. Sumber data dalam penelitian berupa data sekunder yang terdiri dari peraturan hukum, buku literatur serta media internet yang sangat berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, dan berlandaskan pada Undang-Undang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana penerapan dan tantangan lembaga pemerintahan kontemporer yang komprehensif di Indonesia?**

Perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia terus mengalami transformasi sejak era reformasi 1998. Pada era ini, paradigma yang berkembang dalam pemerintah Indonesia adalah tuntutan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dan ada ruang berpartisipasi bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek struktural, tetapi juga meliputi dimensi prosedural dan kultural yang menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel. Transformasi ini merupakan respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik. Transformasi ini mencakup berbagai aspek fundamental dalam tata kelola pemerintahan, termasuk desentralisasi kekuasaan, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga-lembaga negara. Perubahan ini merupakan respons terhadap tuntutan demokratisasi dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Implementasi pemerintahan kontemporer di Indonesia ditandai dengan reformasi birokrasi yang komprehensif. Reformasi ini mencakup penataan organisasi yang lebih ramping, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya restrukturisasi telah menghasilkan pengurangan tumpang tindih fungsi antar lembaga dan optimalisasi kinerja aparatur negara. Hal ini diperkuat dengan digitalisasi pelayanan publik melalui implementasi e-government yang telah meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi secara signifikan.

Desentralisasi kewenangan menjadi salah satu karakteristik utama dalam pemerintahan kontemporer Indonesia. Implementasi otonomi daerah telah memberikan ruang lebih besar bagi daerah dalam mengelola potensi dan mengatasi permasalahan lokalnya. Hal ini sejalan dengan semangat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memperkuat basis legal desentralisasi. Namun, desentralisasi juga membawa tantangan berupa kompleksitas koordinasi antar lembaga dan potensi ego sektoral yang dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Selain itu, praktik desentralisasi juga banyak meningkatkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal itu karena konsekuensi yang dihasilkan dari sistem pemilihan langsung kepala daerah baik pilkada maupun bupati atau walikota oleh masyarakat. Biaya Pilkada membutuhkan political cost yang banyak dan harus dibayarkan kembali melalui berbagai proses dalam pemerintahan, pembangunan serta penyediaan layanan publik.

Aspek penting lainnya dalam pemerintahan kontemporer Indonesia adalah penguatan lembaga-lembaga pengawasan dan antikorupsi. Pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga seperti KPK, OJK, dan Ombudsman telah meningkatkan akuntabilitas pemerintahan secara signifikan. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam menciptakan sistem check and balance yang efektif, meskipun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan politik dan struktural. Transformasi digital dalam pemerintahan membawa tantangan tersendiri berupa kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur. Adanya disparitas signifikan dalam aksesibilitas teknologi informasi antara wilayah urban dan rural. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kualitas pelayanan publik dan menghambat pemerataan pembangunan. Selain itu, adanya kesenjangan antara kompetensi aparatur dengan tuntutan pelayanan publik modern, terutama dalam hal kemampuan digital dan analytical thinking.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif. Pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga melalui mekanisme yang lebih efektif, termasuk penguatan peran Kementerian Koordinator dan implementasi sistem

informasi terpadu. Adanya Urgensi akselerasi pembangunan infrastruktur digital nasional untuk mendukung transformasi pelayanan publik. Pengembangan kapasitas SDM aparatur juga menjadi prioritas utama dalam penguatan pemerintahan kontemporer. Program pengembangan SDM yang sistematis, mencakup pelatihan kompetensi digital, pengembangan kemampuan analitis, dan penguatan budaya inovasi. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melihat dinamika dan kompleksitas tantangan yang dihadapi, masa depan pemerintahan kontemporer Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan. Pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dan responsif dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan reformasi administrasi tidak hanya bergantung pada perubahan struktural, tetapi juga pada transformasi mindset dan budaya kerja aparatur. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan yang visioner dan transformatif menjadi sangat krusial. Pemimpin di berbagai level pemerintahan dituntut untuk mampu mengarahkan perubahan secara sistematis sambil tetap menjaga stabilitas sistem pemerintahan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan bagi perbaikan sistem pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

## **2. Apakah memungkinkan jika lembaga pemerintahan di Indonesia dapat tergeser seiring kemajuan AI?**

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia dapat mempengaruhi lembaga pemerintahan dengan cara yang signifikan. Dalam konteks artikel ini, ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan terkait kemungkinan pergeseran lembaga pemerintahan seiring dengan kemajuan AI.

### **Peran AI dalam Pemerintahan**

- 1) Efisiensi Administratif: Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik, pemerintah Indonesia telah memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam rencana transformasi digitalnya. Beban pegawai negeri sipil dapat dikurangi, misalnya, dengan mengotomatisasi pemrosesan dokumen administratif dan menggunakan chatbot untuk menyampaikan informasi dasar tentang layanan pemerintah.
- 2) Reformasi Birokrasi: Efisiensi dan efektivitas birokrasi dapat ditingkatkan dengan penggunaan AI dalam layanan publik. Untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan layanan publik, pemerintah Indonesia telah mengakui penerapan AI sebagai komponen reformasi birokrasi. Misalnya, mengotomatisasi prosedur administratif dan membuat chatbot untuk menawarkan informasi dasar tentang layanan pemerintah dapat mengurangi kebutuhan campur tangan manusia dalam tugas-tugas yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa peran lembaga pemerintah dapat berubah, dengan sistem AI mengambil alih beberapa tugas yang sebelumnya ditangani oleh pekerja sipil.
- 3) Pengembangan Kebijakan Berbasis Data: Pemerintah dapat menggunakan AI untuk meningkatkan analisis data dan membuat keputusan kebijakan yang lebih baik. Platform yang memanfaatkan data satelit untuk manajemen bencana, seperti Haze Gazer, menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu memajukan kebijakan publik.

### **Tantangan dan Pertimbangan:**

- 1) Kekhawatiran Etika dan Regulasi: Indonesia masih memiliki masalah dengan etika dan regulasi AI, meskipun potensinya sangat besar. Penerapannya yang efektif mungkin terhambat oleh kurangnya kerangka hukum yang jelas yang mengatur penciptaan dan penerapan AI.
- 2) Kesiapan Sumber Daya Manusia: Indonesia harus meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan AI bagi tenaga kerjanya jika ingin mendapatkan manfaat maksimal dari

teknologi AI. Program pelatihan digital telah diperkenalkan untuk membantu pengembangan bakat di industri ini.

- 3) Risiko Pengangguran: Tren menuju otomatisasi dapat menempatkan pegawai negeri pada risiko kehilangan pekerjaan karena teknologi menggantikan mereka. Untuk mencegah dampak buruk terhadap masyarakat akibat peralihan ini, pemerintah harus mengembangkan mekanisme mitigasi.

Secara keseluruhan, kemajuan AI di Indonesia memiliki potensi untuk merombak cara lembaga pemerintahan beroperasi, dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Namun, tantangan terkait regulasi, etika, dan kesiapan sumber daya manusia harus diatasi agar pergeseran ini dapat berlangsung secara positif dan inklusif. Pemerintah perlu mengembangkan kerangka kerja yang mendukung inovasi sambil menjaga kesejahteraan masyarakat dan pegawai negeri.

Penggunaan teknologi AI, secara hukum diakui dalam UUD 1945 yaitu terdapat dalam Pasal 28C UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan umat manusia.” Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyatakan: “Untuk menjamin hak setiap orang untuk menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah akan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dengan mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.” Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya AI yaitu untuk memudahkan manusia dalam meningkatkan mutu kehidupannya.

Kemudian, seiring Kemajuan teknologi AI, AI akan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan manusia. Tidak hanya bisa melakukan, namun AI bisa saja melakukan pekerjaan lebih baik dibanding manusia. Contohnya AI yang melakukan pekerjaan di bidang hukum, yaitu salah satunya ada di Hangzhou (China). AI tersebut sudah ada sejak tahun 2017 yang beroperasi pada penanganan sengketa hukum. Contoh lain ada di Eropa dan Amerika Serikat. Cakupan pekerjaan di dua negara ini lebih luas dibanding yang ada di China, yaitu umumnya digunakan dalam pekerjaan praktisi hukum seperti pengacara

Kemajuan AI, jika melihat dari beberapa contoh diatas tentu sangat memicu kekhawatiran akan tergesernya lembaga pemerintah di Indonesia oleh AI. Namun, jika kita melihat lagi, adanya AI di lembaga pemerintahan justru lebih banyak membawa dampak positifnya. Seperti pada tujuan awal adanya AI bahwa AI ditujukan untuk memudahkan manusia dalam mencapai tujuan. Sehingga, dengan adanya AI yang semakin canggih, maka manusia juga harus mampu mengimbangi agar kemajuan yang telah dicita-citakan akan lebih mudah dan cepat terwujud.

## **KESIMPULAN**

Lembaga pemerintahan kontemporer di Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga-lembaga tersebut telah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi, mereka masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kesenjangan digital. Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pemerintahan menawarkan potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai pengangguran dan aspek etika. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kerangka hukum dan regulasi terkait penerapan AI, sambil memastikan bahwa lembaga pemerintahan tetap berfungsi sebagai pilar demokrasi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pemerintahan

yang lebih baik, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Adaptasi struktural dan perubahan budaya dalam pemerintahan juga menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang ada.

### **Saran**

Lembaga pemerintahan kontemporer harus berperan penting dalam menghadapi tantangan global dan lokal yang semakin kompleks. Dalam perspektif hukum kelembagaan negara, optimalisasi fungsi lembaga pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan reformasi kelembagaan sangat bergantung pada sinergi antara penataan struktur kelembagaan yang efisien, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu lembaga pemerintahan harus beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang jelas, dengan fungsi dan kewenangan yang tidak tumpang tindih. Lembaga pemerintahan harus responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika global dengan mengadopsi strategi yang inovatif, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjalankan amanat konstitusi secara optimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku:**

Fathur Rahman. (2018). Teori Pemerintahan. Malang: UB Press., hlm.2 Retrieved Rahman, F. (2018). Teori Pemerintahan. Universitas Brawijaya Press. melalui link: [https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=-vdqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pemerintahan+adalah&ots=Z\\_kHA46S-J&sig=W2pXLsMSIr9izPQC-nBK0eS3dds](https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=-vdqDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pemerintahan+adalah&ots=Z_kHA46S-J&sig=W2pXLsMSIr9izPQC-nBK0eS3dds) (Senin, 14 Oktober 2024 pukul 10.36 WIB)

Marwan Mas. (2018). Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara. Depok: Rajawali Pers

#### **Artikel:**

Author.(2024).Indonesia Artificial Intelligence.asiasociety.org Retrieved <https://asiasociety.org/policy-institute/raising-standards-data-ai-southeast-asia/ai/indonesia> (Minggu, 17 November 2024 pukul 20.00 WIB)

<https://ifrelresearch.org/index.php/Doktrin-widyakarya/article/download/2474/2278/9111> (Minggu, 17 November 2024)

Irawan, Firlant., dkk. (2024). Implementasi Penggunaan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bantu Hukum Di Indonesia Dalam Menuju Society 5.0

Kusumah, Justisiari Perdana.,dkk.(2024).Artificial Intelligence 2024.chambers and partners.practiceguides.chambers.com Retrieved <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/artificial-intelligence-2024/indonesia/trends-and-developments/O16946> (Minggu, 17 November 2024 pukul 20.20 WIB).

Silitonga, F., & Isbah, M. F. (2023). Artificial Intelligence and the Future of Work in the Indonesian Public Sector. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), 296-308. Retrieved <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/download/62297/27052/188186> (Minggu, 17 November 2024 pukul 20.40 WIB)

Suwarjo, U. (2021). The ILMU PEMERINTAHAN DALAM PRAKTEK: PERSPEKTIF EROFA KONTINENTAL: Ilmu Pemerintahan Eropa Kontinental. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semester)*, 2(1), 20-32. Retrieved <https://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/106> (Senin, 14 Oktober 2024 pukul 10.50 WIB)

#### **Website:**

Kelurahan Tambangan. (2024). Kelembagaan. [keltambangan.semarangkota.go.id](https://keltambangan.semarangkota.go.id) Retrieved [https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan#:~:text=Menurut%20Ruttan%20dan%20Hayami%2C%20\(1984\)%20lembaga%20adalah%20aturan%20di,mencapai%20tujuan](https://keltambangan.semarangkota.go.id/kelembagaan#:~:text=Menurut%20Ruttan%20dan%20Hayami%2C%20(1984)%20lembaga%20adalah%20aturan%20di,mencapai%20tujuan)

- %20bersama%20yang%20diinginkan. (Senin, 14 Oktober 2024 pukul 10.28 WIB)
- Safenet Voice.(2024).Priorities and Challenges of Indonesia’s Artificial Intelligence National Strategy (Stranas KA).safenet.or.id Retrieved <https://safenet.or.id/2022/05/priorities-and-challenges-of-indonesias-artificial-intelligence-national-strategy-stranas-ka/> (Minggu, 17 November 2024 pukul 20.30 WIB)
- Visual Communication Design. (2020). Kontemporer Dalam Fotografi. binus.ac.id. Retrieved <https://binus.ac.id/malang/2020/01/kontemporer-dalam-fotografi/#:~:text=Kontemporer%20menurut%20KBBI%20memiliki%20makna,merupakan%20sebuah%20bidang%20media%20rekam.> (Senin, 14 Oktober 2024 pukul 10.55 WIB)
- Wkikamus. [Komprehensif.id.wiktionary.org](https://id.wiktionary.org/wiki/komprehensif#:~:text=Komprehensif%20berasal%20dari%20bahasa%20Inggris,serta%20memberikan%20wawasan%20yang%20lebih.) Retrieved <https://id.wiktionary.org/wiki/komprehensif#:~:text=Komprehensif%20berasal%20dari%20bahasa%20Inggris,serta%20memberikan%20wawasan%20yang%20lebih.> pada (Senin, 14 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB)